

SKRIPSI
ANALISISFAKTOR-FAKTORPENGHAMBATPENGELOLAAN
KEUANGANPADAPENERAPAN ISAK 35DIORGANISASIPMI
KABUPATEN MAJENE

*ANALYSIS OF THE INHIBITING FACTORS OF FINANCIAL
MANAGEMENT IN THE APPLICATION OF ISAK 35 IN
ORGANIZATION PMI KABUPATEN MAJENE DISTRICT*



ARHAM
C02 19 004

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI**

**ARHAM
C02 19 004**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA PENERAPAN ISAK 35 DI ORGANISASI PMI
KABUPATEN MAJENE**



ARHAM

C02 19 004

Skripsi sarjana lengkap untuk memenuhi salah Satu

Syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi

Program studi akuntansi fakultas ekonomi

Universitas sulawesi barat

Telah disetujui oleh

Pembimbing I

Taufik Hidayat B. Tahawa, S.E., M.Ak

NIP : 199308202019031016

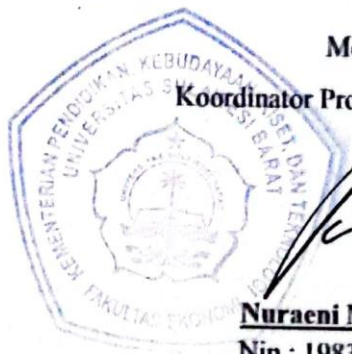
Pembimbing II

Muhammad Ihsan Ansari S.E, M.Ak

NIP : 199006217022031002

Menyetujui

Koordinator Program Studi Akuntansi



Nuraeni M. S.Pd., M.Ak

Nip : 19831203201903 2 006

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA PENERAPAN ISAK 35 DI ORGANISASI PMI
KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

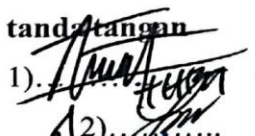




ARHAM

C02 19 004

telah diuji dan diterima panitia ujian

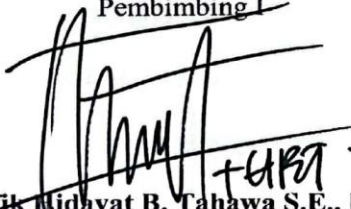
Pada Tanggal 18 juli 2023 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Nama penguji	Jabatan	tandatangan
1. Taufik Hidayat B.Tahawa, SE., M.Ak.,	Ketua	1). 
2. Muhammad Ihsan Ansari S.E., M.Ak., CGRM	Sekretaris	2). 
3. Sitti Hadijah S.Pd., M.Ak	Anggota	3). 
4. Jumardi S.E., M.Si	Anggota	4). 
5. Sufyan Amirullah S.E., M.Ak., CGRM	Anggota	5). 

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Taufik Hidayat B. Tahawa S.E., M.Ak
Nip : 199308202019031016

Pembimbing II



Muhammad Ihsan Ansari S.E., M.Ak
Nip : 199006212022031002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi




Dr. Dra. Enny Radiab. M. AB
Nip : 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

ARHAM. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Pada Penerapan ISAK 35 Di Organisasi PMI Kabupaten Majene, dibimbing oleh Taufik Hidayat B. Tahawa S.E., M.Ak dan Muhammad Ihsan Ansari S.E., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan di organisasi Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara di PMI Kabupaten Majene. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya beberapa hambatan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia Dalam Ilmu Akuntansi, kendala pemahaman ISAK 35, Keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

Kata kunci : Faktor-Faktor Penghambat, ISAK 35, Palang Merah Indonesia, Pengelolaan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang teknologi dan pendidikan menjadi semakin penting di Indonesia Sebagai hasil dari implementasi teknologi ini ada peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan manusia dan kemakmuran ekonomi, Perdebatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berpotensi mempengaruhi pemilihan permasalahan dan penderitaan di masyarakat (Mustakin, agus wahyudi, 2021).

Organisasi nirlaba sering disebut sebagai organisasi nonlaba, nama yang berubah dari nama yang disetujui oleh Ikatan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK IAI), yang menggunakan kata "nonlaba". Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 35 Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 Standar Pelaporan Keuangan (IAI, 2019).

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi pada umumnya karena sumber dana dari organisasi nirlaba berasal dari mandiri, dan sumbangan dari pihak-pihak tertentu terutama masyarakat yang mampu menentukan tujuan organisasi tersebut (Yola Oktavia, 2021).

Organisasi nirlaba harus berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memenuhi misinya. Selain itu, organisasi nirlaba memiliki tingkat transparansi dan ketergantungan yang tinggi dengan publik sebagai akibat dari penggunaan laporan keuangan sebagai alat manajemen organisasi. (Gultom, 2015 dalam Yola- Oktavia,2021)

Laporan keuangan asosiasi nirlaba ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang mencakup organisasi nirlaba. Penyusunan laporan organisasi nirlaba diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi No. ISAK 35, berdasarkan empat jenis laporan keuangan yang harus disusun: Laporan perubahan aktiva bersih, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. ISAK 35 adalah undang-undang baru yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Salah satu manfaat terpenting dari undang-undang ini adalah membedakan antara nonlaba dan nirlaba karena laba tidak hadir di siang hari tetapi hadir di malam hari (Yola Oktavia, 2021).

Dalam ISAK 35 memang penting digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab atau informasi yang relevan dan dilengkapi sesuai dengan standar akuntansi untuk aset yang diperoleh sehingga semua pengguna laporan keuangan dapat memahami dan dalam laporan keuangan tersebut.

Selain menangani masalah keuangan pada organisasi nirlaba tugas kedua sedang dilakukan pada organisasi perhimpunan nasional Palang Merah Indonesia di Kabupaten Majene. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mempromosikan atau meminimalkan pendidikan penderitaan sesama manusia akibat bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia tanpa memandang latar belakang manusia yang ditolong, Palang Merah Indonesia juga memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait ilmu dalam kepalangmerahan Selain itu organisasi ini mendukung partisipasi publik dalam bidang sosial dan individu sesuai konvensi 1949.

Palang Merah Indonesia yang disingkat PMI adalah perkumpulan nasional yang berlandaskan prinsip kemanusiaan dan kerelawanan tanpa membeda-bedakan

bangsa, golongan, dan pandangan politik (UU No. 1 Tahun 2018) Tentang peran Palang Merah Indonesia Untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Palang Merah Indonesia memberikan pelayanan masyarakat yang meliputi tanggap darurat, pelatihan pertolongan pertama relawan, bantuan bencana, layanan transfusi darah, dan perawatan kesehatan.

Organisasi ini harus dikembangkan dan dikelola dengan baik terutama di bidang pengelolaan keuangan, Ini bukan kritik atau kesalahan tetapi dalam pengamatan ini memang sering dilakukan dengan tujuan tanggung jawab kualitas Sehingga dengan adanya pelaporan keuangan dapat memberikan informasi kepada para penggunanya dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktor adalah keadaan suatu benda atau peristiwa yang mempengaruhi atau menyebabkan sesuatu . Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, hambatan diterjemahkan menjadi hal-hal keadaan atau alasan penghambat lainnya (mencegah, menjaga). Terakhir faktor penghambat adalah semua hal yang mencegah atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu (Sri David K, 2018: 17).

ISAK No. 35 “Penyajian Laporan Tahunan organisasi nirlaba berdasarkan dengan perubahan dalam penyajian laporan tahunan” PSAK 1. ISAK 35 adalah pedoman atau praktik akuntansi umum yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. agar penyajian laporan keuangan konsisten dan peran akuntansi manajemen keuangan terwujud Bagi organisasi, baik yang mencari keuntungan maupun tidak mencari keuntungan.

Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) percaya bahwa kontras utama antara entitas berorientasi nirlaba dan bidang usaha berorientasi nirlaba ialah bagaimana entitas berorientasi nirlaba beroperasi. Mendapat sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan penyeteroran kembali atau manfaat ekonomi yang seimbang dengan jumlah sumber yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa beberapa organisasi nirlaba telah gagal menerapkan ISAK 35 seperti sebelumnya dalam penelitian Mustakin, Agus Wahyudi (2021) dengan judul “Analisis faktor-faktor penghambat Implementasi ISAK 35 Masjid Al-Ihsan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa General Manager Masjid Al-Ihsan menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan ISAK 35 Oleh karena itu pembuatan laporan keuangan dibatasi hanya pada penerimaan dan pembayaran kas, Salah satu kendala pengelolaan Masjid Al-Ihsan mengalami resesi sumber daya manusia.

Begitu pula dengan penelitian Elok Oktavia Widhawati, Suhartini, Astrini (2021) dengan judul Akuntabilitas dan transparansi sebagai implementasi ISAK 35 pada masjid An-Nuur Menyimpulkan bahwa ISAK 35 belum diterapkan Hal ini karena pengelola dana Takmik lainnya tidak mengetahui dan memahami ISAK 35 dan belum menghasilkan laporan keuangan yang sederhana. Organisasi ini adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang netral yang berpusat di Jakarta serta memiliki cabang dan unit di setiap kota di Indonesia, Bahkan di setiap negara-negara tersebut memiliki organisasi tersebut.

Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene terbilang belum cukup mahir dalam pengelolaan keuangannya masih sebatas pencatatan laporan keuangan sederhana.

Pada hasil observasi pada organisasi Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene yang disampaikan langsung oleh bapak Abdul Rahman selaku penanggung jawab keuangan Organisasi Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan belum menerapkan atau mengacu pada pedoman ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi Non laba.

Oleh karena itu, Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian di organisasi PMI Kab. Majene dengan judul **“Analisis faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Pada Penerapan ISAK 35 Di Organisasi PMI Kab. Majene”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah tentang, Apa faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan pada penerapan ISAK 35 PMI Kab. Majene?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian atau riset ini ialah agar memberikan kejelasan sehingga faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan pada Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Nomor 35 dapat diketahui apakah PMI Kabupaten Majene sudah menerapkan ISAK 35 atau memang sama sekali belum diterapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan di organisasi Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene sehingga penelitian ini bisa menjadi referensi untuk para peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait pada faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan sehingga belum menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 pada organisasi yang beralih di bidang sosial kemanusiaan yang membantu dalam meringankan beban manusia akibat bencana alam ataupun bencana yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh peneliti memberikan suatu pengalaman serta menambah pengetahuan serta memperluas wawasan terkait tentang faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan pada organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan serta aturan pengelolaan keuangan yang berstandar ISAK 35.

2. Bagi PMI Kabupaten Majene

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta mempelajari apa yang harus dibenahi serta masukan dalam pengelolaan keuangan serta memperbaiki semua sistem pelayanan organisasi terutama dalam administrasi keuangan sehingga nantinya organisasi PMI Kabupaten majene menjadi organisasi terpercaya dan banyak donatur yang memberikan

bantuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kepalangmerahan yang bersifat kemanusiaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi serta membantu para peneliti selanjutnya untuk mengulik lebih dalam informasi terkait penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan yang ada pada organisasi nirlaba, khususnya pada organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Majene.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan suatu proses yang mengatur dalam keuangan secara terstruktur dimulai dari tahap perencanaan, perancangan anggaran, dan pengendalian kegiatan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan adalah salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah organisasi untuk mengemban suatu tugas dan melaksanakan fungsi administratif seperti pengumpulan data, pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan data keuangan, pengendalian anggaran, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya (fera setiyo wardoyo 2020).

Pengelolaan keuangan merupakan suatu yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan serta pertanggungjawaban, yang merupakan suatu tugas yang wajib dilaksanakan secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah diterapkan. Organisasi sektor publik memerlukan suatu pedoman untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya, pengelolaan keuangan berguna bagi organisasi nirlaba karena dalam pengelolaan keuangan itu sendiri mengupayakan agar tetap stabil (rahmatia, 2019).

Menurut Hasrina y (2015:476-477) pengelolaan keuangan ini berarti penyelenggaraan dan pengelolaan perekonomian menurut prinsip-prinsip ekonomi keuangan yaitu:

1. Kewajiban

Organisasi harus bertanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat/publik untuk pengelolaan keuangan. Elemen penting dari akuntabilitas adalah legitimasi yaitu setiap transaksi harus bersumber dari badan hukum dan pengawasan tertentu yaitu prosedur yang efektif untuk mengamankan kekayaan uang dan barang dan untuk mencegah segala penyimpangan dan penyalahgunaan pendapatan yang sah dan jelas sempurna, akurat pengguna.

2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan

Pengelolaan keuangan harus ditata sedemikian rupa sehingga kewajiban itu terpenuhi sesuai waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Dalam pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan sehingga pengelolaan keuangan berjalan dengan baik serta dipercaya.

4. Hasil Guna Dan Daya Guna

Merupakan tata cara dalam mengelola keuangan dengan secara efisien sehingga kegiatan yang di rencanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai apa yang diharapkan sehingga dalam waktu yang dimanfaatkan secara efektif.

5. Pengendalian

Staf pengelola keuangan serta pengawas harus melakukan pengendalian dengan tujuan dapat tercapai. Pada dasarnya pengelolaan keuangan sebuah proses mengolah dan serta menggunakan dana di organisasi.

2.1.1.2 Tujuan Pengelolaan Keuangan

Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi, tujuan ini merupakan sebuah prinsip atau tujuan yang tak dapat diubah-ubah serta selaras dalam mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas, adalah sebuah prinsip yang dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keuangan yang dikelola oleh organisasi. Terhadap suatu organisasi yang dijalankan.
3. Transparansi, ini merupakan petunjuk agar dapat dilihat secara publik serta memberikan suatu rencana aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan. Khususnya laporan keuangan organisasi.

2.1.2 Pengertian, ciri-ciri, karakteristik Organisasi Nirlaba

2.12.1 Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi Nirlaba atau organisasi Non laba adalah organisasi yang tujuan utamanya mendukung suatu sebab yang penting untuk menarik perhatian publik tujuannya nonkomersial tanpa tujuan laba. Organisasi nirlaba juga meliputi gereja, organisasi kemanusiaan serta yayasan dan lain sebagainya, Organisasi nirlaba pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai suatu tujuan dari sekelompok orang yang memilikinya Karena itu bukan tidak mungkin diantara lembaga yang satu dengan

yang lain memiliki filosofi yang berbeda maka operasionalisasi dan filosofi tersebut kemungkinan juga akan berbeda (Ayu Yolanda, 2021).

2.1.2.2 Ciri-Ciri Organisasi Nirlaba

Menurut Desi Andikawati (2014) ada beberapa ciri-ciri organisasi nirlaba:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang atau jasa apabila entitasnya menghasilkan laba maka jumlah tersebut tidak pernah dibagi kepada pemilik atas pendiri entitas tersebut.
3. Organisasi ini tidak ada yang berhak memilikinya seperti organisasi pada umumnya, dalam artian ini tidak dapat diperjual belikan atau dialihkan kepada orang lain.

2.1.2.3 Karakteristik Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba berbeda sifatnya dengan organisasi komersial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menerima sumber daya dari sumbangan anggota dan donor lain yang tidak mengharapkan apa pun dari organisasi, Perbedaan terbesar terlihat pada bagaimana organisasi memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional (Ayu Yolanda dan Lidia P.A, 2021).

2.1.2.4 Klasifikasi Organisasi Nirlaba

Menurut Lidia P.A (2016) dalam kotler (2003:23), Organisasi nirlaba dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Instansi pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang yang berwenang memberikan pelayanan dan memungut pajak.
2. Organisasi sektor swasta nirlaba atau independen yang biasanya beroperasi sebagai organisasi bebas pajak tetapi diatur di luar pemerintah dan yurisdiksi. organisasi tersebut dapat berupa asosiasi pendidikan, layanan kemanusiaan, bisnis atau profesional. Organisasi swasta atau pemerintah yang dibentuk oleh parlemen yang memiliki monopoli terbatas untuk menyediakan jasa atau memasok barang tertentu kepada kelompok masyarakat.

1.1.3 Interpretasi standar akuntansi Keuangan (ISAK 35)

2.1.3.1 Definisi ISAK Nomor 35

ISAK 35 mengikuti PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan memberikan pedoman pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba DSAK mengesahkan ISAK 35 IAI pada September 2018 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020 ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba, ISAK 35 menggantikan PSAK 45 yang mengatur laporan keuangan oleh organisasi nirlaba, Paragraf 05 yang memuat contoh bagaimana entitas yang tidak berorientasi laba melakukan penyesuaian baik penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk item tertentu dalam laporan keuangan maupun penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.

2.1.3.2 Laporan Keuangan ISAK 35

Berdasarkan ISAK 35 keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi nonlaba antara lain laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut (sukma diviana, ranga putra ananto, et al., 2020) Penjelasan dari laporan yang dipakai dalam ISAK 35:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas dan aset bersih pada waktu tertentu. Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas dan aset neto dan juga informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan keuangan entitas merupakan suatu cakupan dari keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan yang menggunakan laba untuk memperlakukan periode tertentu yang disebut dengan kinerja keuangan selama periode tersebut. Informasi yang dikumpulkan dalam laporan ini, selain data yang dikumpulkan dalam laporan laba rugi periode berjalan, adalah data yang dikumpulkan dalam laporan laba rugi untuk alasan berikut: data, beban keuangan, laba atau rugi dari metode investasi, laba pajak, laba rugi, atau neto.

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto ini merupakan laporan yang menyajikan suatu informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari sumber pemberi sumber daya.

4. Laporan Arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu, setelah itu laporan tersebut dikelompokkan menurut aktivitasnya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan ini memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan sebagai referensi saat menyiapkan laporan.

5. Catatan Atas Laporan Akuntansi

Catatan yang disajikan dalam laporan ini termasuk dalam penyusunan laporan tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan Penyediaan informasi tambahan tentang estimasi yang dibuat dalam laporan keuangan. Perhitungan detail seperti aset tetap disajikan untuk menggambarkan laporan keuangan ini.

2.1.3.3 Ruang Lingkup Objek ISAK 35

Ruang lingkup bagian ISAK 35, yaitu:

1. Organisasi nirlaba terlepas dari bentuk hukumnya
2. Perusahaan yang menerapkan SAK ETAP juga berlaku
3. ISAK 35 hanya mengatur penyajian laporan keuangan dan karenanya aturan pelaporan keuangan lainnya diatur organisasi nirlaba mengacu pada SAK atau SAK ETAP masing-masing. (DSAK IAI, 2020:35.1)

2.1.3.4 Palang Merah Indonesia (PMI)

Menurut penulis Palang Merah Indonesia (PMI) organisasi yang pertama kali didirikan Oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Djohan merupakan organisasi nasional Indonesia yang mengamalkan sosial kemanusiaan, Organisasi ini mendapat dukungan dari kalangan terpelajar di Indonesia dan kemudian didirikan pada tanggal 17 September 1945 sebulan setelah kemerdekaan dan diperkuat dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950 dan kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden No. 246, 1963.

Misi utamanya adalah membantu pemerintah dalam "memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana alam dan perang". Menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 Perhimpunan Palang Merah memiliki prinsip dasar Gerakan Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. Palang Merah Indonesia beroperasi di 34 wilayah (tingkat provinsi) dan memiliki 408 PMI (tingkat kota/kabupaten) di seluruh Indonesia, Dimana salah satunya ada di Kabupaten Majene (Rahmatia R, 2019).

Organisasi palang merah merupakan organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum dan terdaftar dinegara serta memiliki peraturan perundang-undangannya, undang-undang tersebut (No 1 Tahun 2018) tentang kepalangmerahan guna menjalankan semua kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan konvensi jenewa 1949. Tujuannya adalah dapat mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban bencana dan konflik perang tanpa membeda-

bedakan suatu agama, bangsa, ras, golongan, serta pandangan politik. Tugas yang dilakuka PMI yaitu:

1. Memberikan bantuan pada saat terjadi konflik militer, bencana alam dan kerusuhan
2. Penyediaan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Pelatihan Palang Merah dan pelatihan bagi para relawan
4. Penyediaan layanan sosial dan kesehatan

Menurut penulis dalam palang merah memiliki tingkatan yaitu:

1. TSR (Tenaga sukarela)

Tenaga sukarela adalah anggota PMI yang direkrut dari perseorangan dari kalangan masyarakat yang berlatar belakang profesi atau memiliki keterampilan tertentu, misalnya dokter, ahli gizi, akuntan, logistik, jurnalis dan lain sebagainya dan telah mengikuti pendidikan seta latihan tentang kepalangmerahan.

2. KSR (Korps Sukarela)

Korp sukarela merupakan unit PMI yang menjadi wadah bagi anggota biasa serta memiliki kesadaran untuk mencalonkan diri serta melalui tahap orientasi atau pendidikan latihan dasar (DIKLATSAR). Serta kebanyakan dari anggota KSR Itu adalah pemuda-pemudi terkhususnya adalah mahasiswa-mahasiswi yang memiliki jiwa kepalangmerahan sehingga KSR adalah ujung tombak bagi Palang Merah Indonesia baik itu pusat, provinsi, maupun kabupaten.

3. PMR (Palang Merah Remaja)

Palang Merah Remaja adalah suatu organisasi binaan dari PMI yang berpusat di sekolah-sekolah ataupun kelompok masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan karakter kepalangmerahan agar siap menjadi relawan masa depan.

1.2 Peneliti Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan pada penerapan ISAK 35 pada organisasi nirlaba (PMI).

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama peneliti	Nama judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mustakin, agus wahyudi (2021), journal of accounting finance and auditing vol.3, Nomor 2	Analisis faktor-faktor penghambat penerapan ISAK 35 masjid al-ihسان	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Ihsan tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu. ISAK 35, karena tuturannya masih sederhana, yaitu. Kas masuk dan pembayaran.	Penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya sama-sama membahas tentang faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan pada ISAK 35 menggunakan metode kualitatif	peneliti sebelumnya meneliti di bidang keagamaan sedangkan penelitian selanjutnya meneliti di bidang sosial kemanusiaan
2	Sonia sischa eka putri (2022), jurnal pendidikan tambusai vol. 6 No. 2	Analisis pengelolaan keuangan masjid di kota duri riau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan masjid tidak dikumpulkan sesuai standar dan kurangnya sumber	Penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan Dana yang tersedia dan metode yang	riset terdahulu belum mengimplemen-tasikan laporan keuangan masjid

No	Nama peneliti	Nama judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			daya untuk pengumpulan laporan keuangan.	digunakan adalah metode kualitatif	sedangkan peneliti terdahulu pada organisasi kemanusiaan
3	Sukma diviana, rangga putra ananto, wiwik andriani, roni putra, armel yentifa, zahara, dan azi siswanto adalah beberapa tokoh lainnya. (2020) jurnal akuntansi manajemen Vol. 15 No 2	Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan Isak 35 pada masjid baitul haadi	Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan dalam penyajian laporan keuangan masjid belum tercatat sesuai standar karena penyusunannya masih sebatas laporan kas masuk dan keluar	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35	Dari penelitian terdahulu bergerak dalam bidang keagamaan serta membahas tentang penyajian laporan keuangan sedangkan peneliti selanjutnya bergerak di bidang kemanusiaan yang membahas faktor-faktor penghambat
4	Rahmatia rahmatia (2019) journal economic and business of islam vol.4 nomor 1	Analisis akuntabilitas pengelolaan anggaran pada markas PMI provinsi gorontalo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyeleenggaraan pengelolaan anggaran pada PMI provinsi gorontalo telah akuntabel dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sumber dana PMI, sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat, iuran dana, dan bulan dana.	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang pengelolaan anggaran di organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan	Penelitian sebelumnya membahas tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran di organisasi palang merah provinsi gorontalo sedangkan yang penelitian sekarang

No	Nama peneliti	Nama judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
					membahas faktor-faktor penghambat di PMI Kab. Majene
5	Yunita hasrina (2015) jurnal manaje-men & bisnis sriwijaya vol. 13 nomor 4	Analisis pengelolaan keuangan <i>rural infrastructure support</i> program nasional pemberdayaan masyarakat(RIS-PNPM) di orgaisasi masyara-kat setempat kecamat-an tuah negeri kabupaten musi rawas	Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan prasarana pedesaan mendukung masyarakat nasional program pemberdayaan di organisasi masyarakat lokal kecamatan musi rawa tuah state sudah berjalan dengan baik, diketahui memiliki tanggung jawab.	Peneliti sebelumnya dan sekarang sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan dan membahas tentang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan	penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif serta tidak berdasar-kan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif

2.3 Kerangka Berfikir

Interpretasi Standar Akuntansi No. 35 merupakan turunan dari PSAK 1 yang menyajikan laporan keuangan nirlaba dari perubahan PSAK menjadi ISAK dikarenakan penggantian nama nir yang artinya tidak atau bukan dianggap kurang tepat untuk organisasi seperti dibidang sosial kemanusiaan serta di bidang religi. Jadi nir di ganti dengan nama nonlaba yang diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI).

Organisasi Nonlaba ini merupakan suatu lembaga dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi Nonlaba yang dimaksud yaitu PMI sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak berorientasi pada laba atau kekayaan semata.

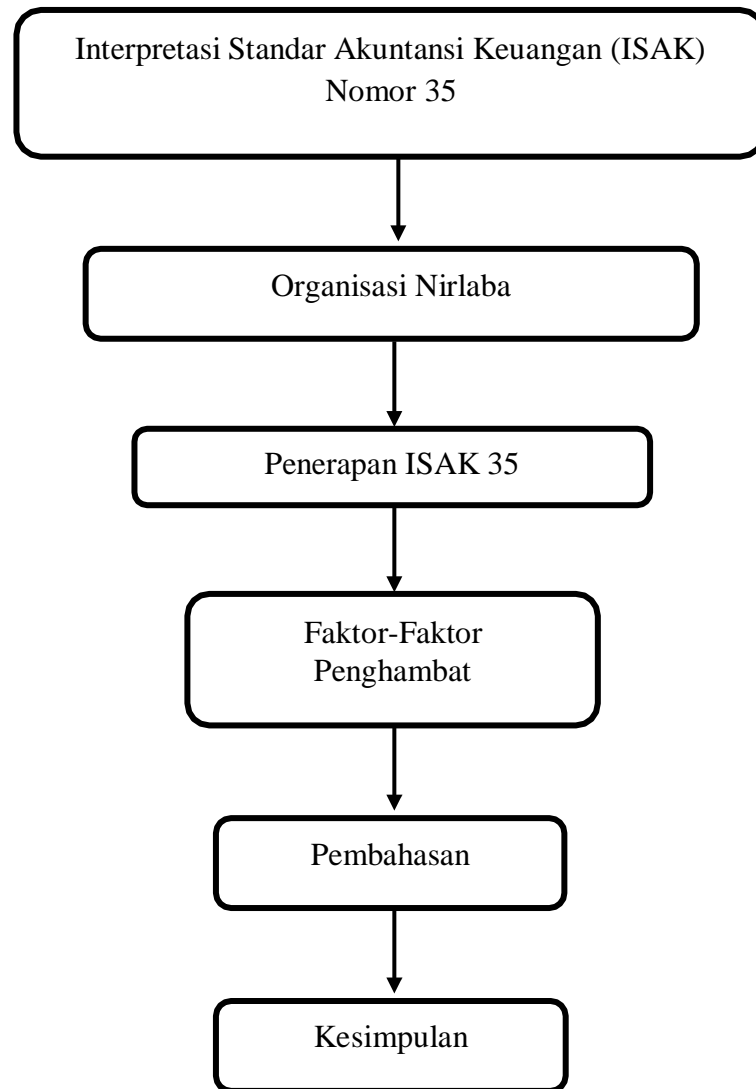
Penerapan adalah suatu praktek yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu terkhusus pada penerapan ISAK 35 di organisasi PMI Kabupaten Majene apakah ISAK 35 sudah di terapkan atau belum sehingga kita harus mencari faktor faktor apa saja yang menghambat pada organisasi PMI

Faktor penghambat ini juga merupakan suatu hal yang bersifat menghambat atau bahkan juga menahan terjadinya sesuatu, sehingga segala sesuatunya terhambat dan bahkan dapat dikatakan prosesnya tidak berkembang dengan baik.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bagan yang tertera dibawah itu saling berhubungan karena dalam organisasi nonlaba terkhususnya Palang Merah Indonesia belum dapat menerapkan ISAK 35, Kemudian penulis mencari faktor-faktor penghambatnya mengapa ISAK 35 tidak di jalankan sebagaimana mestinya.

Setelah itu dalam menganalisis juga membutuhkan suatu teknik pengumpulan data yang dimana mewawancarai objeknya agar dapat diketahui apa faktor-faktor penghambatnya. Lalu dalam kesimpulannya data-data yang telah didapatkan disusun sebaik mungkin. Sehingga hasil penelitian ini menemukan hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas maka dibuat kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan pada saat Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35), dapat disimpulkan bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene belum mengadopsi ISAK 35 menurut laporan manajemen PMI. Kabupaten Majene hanya sebatas laporan sepengetahuan manajemen. Kendala yang dihadapi oleh manajemen PMI Kabupaten Majene antara lain kurangnya sumber daya manusia di bidang akuntansi, keterbatasan dalam memahami ISAK 35 dan keterbatasan waktu untuk menyusun laporan keuangan.

5.2 Saran.

1. Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene terutama penanggungjawab pengelolaan keuangan hendaknya ikut serta dalam pelatihan pengelolaan keuangan baik itu dari internal maupun eksternal organisasi sehingga dengan adanya pemahaman terkait pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka akan baik pula organisasi kedepannya.
2. Terkait dengan Penelitian yang dilakukan memiliki banyak keterbatasan baik dari segi metodologi penelitian maupun ruang lingkup penelitian, dan penelitian ini tidak dapat memberikan informasi atau praktik langsung kepada informan tentang kesesuaian sistem akuntansi ISAK 35 dengan standar saat

ini. Praktik langsung bagi pelapor untuk menginterpretasikan Standar Akuntansi (ISAK 35)

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dan dapat menggali secara mendalam bukan hanya sekedar apa yang diucapkan orang lain maupun yang terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar:CV. Syakir Media Press
- Andikawati D. 2014. *Laporan Keuangan Lembaga Masjid*. Artikel Ilmiah Mahasiswa
- Alfansyur A, Mariana. 2020. Seni Mengelola Data: Penerapan triangulasi Teknik, Sumber, Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Pendidikan & Pengembangan Pendidikan Sejarah*.5(2)146-167.
- Danim, Sudarwan.2013.*menjadi Peneliti Kualitatif*.Bandung:Pustaka setia
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan(2018).draf Eksponsur ISAK 35.
- Dewi N.2021.Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan ISAK 35.
- Diviana S.Putra Ananto R.Andrian W.dkk.2020.Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Haadi.*Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.2(15)113-132.
- Eka Putri S.S.2022.Analisis Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Duri Riau.*Jurnal Pendidikan Tambusai*.2(6)13970-13976
- Hasrina Y.2015.Analisis Pengelolaan Keuangan *Rural Infrastructure Support* Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Organisasi Masyarakat Setempat Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.*Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*.4(13).
- Lidia P.A.2016. Rekontruksi Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Panti Asuhan Kanaan Jember Berdasarkan PSAK Nomor 45.*Digital Repository Universitas jember*.
- Mustakin, wahyudi A.2021.Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35. *JAJA*.2(3), 45-52
- Oktavia Widhawati E, Dwi Suhartini, Wideretno A.A.2021.Akuntabilitas Dan Transpransi Sebagai Implementasi ISAK 35.*Junal Proaksi*.8(2)363-375
- Oktavia Y.2021.Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 Pada Kelompok Tani Mekar Sari.*Jurnal Akuntansi Syariah*.2(1)157-166.

Rahmatia R.2019.Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo..*JEBI*.1(4)30-49.

Sarwono J.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.yogyakarta:Graha Ilmu.

Widha Kurniawan A, Puspitaningtyas Z.2016.*Metode penelitian kuantitatif*.yogyakarta:pandiva buku.

Yolanda A.2021.*Penerapan ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Masjid Nur Iman Kenagarian Kumango*.